

**PENGARUH *MONEY POLITICS* TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIH
PEMULA PADA PEMILIHAN WALI KOTA PALOPO TAHUN 2024
(Kasus Kelurahan Sendana)**



USWATUN HASANAH

E031221043



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2026

**PENGARUH *MONEY POLITICS* TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIH
PEMULA PADA PEMILIHAN WALI KOTA PALOPO TAHUN 2024
(Kasus Kelurahan Sendana)**

USWATUN HASANAH

E031221043



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**THE INFLUENCE OF MONEY POLITICS ON THE VOTING DECISIONS OF
FIRST-TIME VOTERS IN THE 2024 PALOPO MAYORAL ELECTION
(A Case Study of Sendana Subdistrict)**

USWATUN HASANAH

E031221043



**STUDY PROGRAM OF SOCIOLOGY
DEPARTEMENT OF SOCIOLOGY
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
HASANUDDIN UNIVERSITY
2026**

SKRIPSI**PENGARUH *MONEY POLITICS* TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIH
PEMULA PADA PEMILIHAN WALI KOTA PALOPO TAHUN 2024
(Kasus Kelurahan Sendana)**

USWATUN HASANAH
E031221043

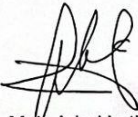
Skripsi

telah dipertahankan di depan panitia ujian sarjana sosiologi pada 15 Juni 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Sarjana (S1) Sosiologi
Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

Menyetujui:
Pembimbing Tugas Akhir,


Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si.
NIP 196510161990021002

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Dr. M. Ramli AT, M.Si.
NIP 196607011999031002

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi yang berjudul "**Pengaruh *Money Politics* Terhadap Keputusan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Wali Kota Palopo Tahun 2024 (Kasus Kelurahan Sendana)**" adalah benar karya saya dengan arahan pembimbing **Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si**. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 15 Juni 2026



USWATUN HASANAH
NIM E031221043

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirabbil'alamini, di atas lembar yang menjadi saksi akhir perjalanan ini, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk :

1. Pintu Surgaku, Ibunda tercinta yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Sosok yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang. Cinta pertamaku, seuperhero dan panutan, Ayahanda tercinta. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis.
2. Kakak Kandung tercinta yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam setiap langkah penulis. Terima kasih telah menjadi tempat bersandar dan sumber kekuatan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si selaku pembimbing skripsi dan Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses pendidikan di Departemen Sosiologi.
4. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin berserta Wakil Rektor, staf dan jajaran.
5. Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berserta Wakil Dekan, staf dan jajaran.
6. Dr. Ramli AT, M.Si. selaku Ketua Departemen Sosiologi
7. Seluruh staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta staf Departemen Sosiologi terutama Kak Rahma yang telah membantu berbagai kebutuhan administrasi selama penulis menjalani masa studi.
8. Dr. Nuvida Raf., S.Sos.,MA. dan Dr. Sultan, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan berbagai kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Beasiswa Unggulan Kemendikdasmen yang telah memberikan kesempatan serta dukungan pembiayaan pendidikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Sahabat penulis Azra Syafiqah, yang telah hadir dan kebersamai penulis sejak awal masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian studi. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, bantuan, serta berbagai pengalaman berharga yang telah diberikan selama proses perkuliahan.

11. Pratiwi Maharani, sahabat penulis sejak masa Sekolah Dasar, terimakasih atas segala motivasi yang telah diberikan.
12. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rahmi Khilfa Wilda Lestari, lin Imran, Ninis Karlina, Alya Rianti Amaliah, Nabila Putri, Arini, dan Restu Alya selaku teman-teman berbagi keluh kesah. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik.
13. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Nahwa Yasin yang selalu memberikan semangat dan energi positif diberbagai proses yang dilalui penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan turut memberikan warna dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-Teman Sosiologi 22 yang telah kebersamai selama proses perkuliahan.
16. Teman-teman Posko KKNT 113 Watang Soreang, Saddam, Yuar, Jaemil, Dewi, Nanda, Dian, dan Zahra, yang telah menjadi keluarga selama masa pengabdian. Terima kasih atas kenangan serta pelajaran berharga yang akan selalu dikenang oleh penulis.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa selama penulis menjalani proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis

Uswatun Hasanah

ABSTRAK

Uswatun Hasanah, E031221043. Pengaruh Money Politics Terhadap Keputusan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Wali Kota Palopo Tahun 2024 (Kasus Kelurahan Sendana). Dibimbing Oleh Iqbal Latief. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk politik uang yang terjadi pada Pemilihan Wali Kota Palopo Tahun 2024 di Kelurahan Sendana serta untuk menganalisis pengaruh politik uang terhadap keputusan holistik pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan strategi survei. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pemula berusia 17–21 tahun di Kelurahan Sendana dengan jumlah sampel sebanyak 64 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner dan wawancara terstruktur. Data dianalisis menggunakan analisis statistik dengan bantuan uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang pada Pemilihan Wali Kota Palopo Tahun 2024 di Kelurahan Sendana terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu pemberian uang tunai (*serangan fajar*), pemberian barang seperti sembako, serta pemberian janji politik. Praktik tersebut dilakukan secara langsung maupun melalui tim sukses untuk mempengaruhi pilihan pemilih pemula. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa politik uang memiliki pengaruh terhadap keputusan pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih pemula cenderung mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari pemberian uang, barang, maupun janji politik dalam menentukan kandidat yang dipilih. Dalam perspektif teori pilihan rasional James Samuel Coleman, pemilih pemula dipandang sebagai aktor yang bertindak berdasarkan pertimbangan rasional untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi perilaku memilih pemilih pemula sehingga praktik politik uang masih dianggap sebagai hal yang biasa dalam proses Pilkada. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi karena keputusan memilih tidak sepenuhnya didasarkan pada visi, misi, dan kualitas kandidat, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan materi jangka pendek.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilih Pemula, Pilkada, Keputusan Memilih, Sosiologi Politik.

Uswatun Hasanah, E031221043. *The Influence of Money Politics on the Voting Decisions of First-Time Voters in the 2024 Palopo Mayoral Election (A Case Study of Sendana Subdistrict)*. Supervised by Iqbal Latief. Faculty of Social and Political Sciences.

This study aims to identify the forms of money politics that occurred in the 2024 Palopo Mayoral Election in Sendana Subdistrict and to analyze the influence of money politics on the voting decisions of first-time voters. This study employed a quantitative approach with a descriptive research type and survey strategy. The population of this study consisted of first-time voters aged 17–21 years in Sendana Subdistrict, with a sample of 64 respondents determined using the Slovin formula. Data were collected through observation, questionnaires, and structured interviews. The data were analyzed using statistical analysis with a simple regression test. The results of the study indicate that the practice of money politics in the 2024 Palopo Mayoral Election in Sendana Subdistrict occurred in various forms, including the distribution of cash (dawn attacks), the provision of goods such as basic food packages, and political promises. These practices were carried out directly or through campaign teams to influence the choices of first-time voters. The study also shows that money politics has an influence on the voting decisions of first-time voters. First-time voters tend to consider the benefits gained from money, goods, and political promises when determining their political choices. From the perspective of James Samuel Coleman's Rational Choice Theory, first-time voters are viewed as actors who act rationally to obtain certain benefits. The social and economic conditions of the community also influence the voting behavior of first-time voters, causing the practice of money politics to be considered common in the electoral process. This study demonstrates that money politics can affect the quality of democracy because voting decisions are not entirely based on the vision, mission, and quality of the candidates, but are also influenced by short-term material interests.

Keywords: Money Politics, First-Time Voters, Regional Election, Voting Decisions, Political Sociology.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Deskripsi Konsep, Teori dan Penelitian Terdahulu	6
1.6 Alur Kerangka Konseptual.....	16
1.7 Hipotesis	16
1.8 Definisi Operasional	17
1.9 Matriks Pengembangan Indikator	18
BAB II METODE PENELITIAN	20
2.1 Pendekatan, Strategi, dan Tipe Penelitian.....	20
2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	21
2.3 Populasi dan Sampel	21
2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
2.5 Sumber Data	23
2.6 Teknik Analisis Data.....	24
2.7 Pengujian Keabsahan Data.....	26
2.8 Teknik Penyajian Data	28
BAB III HASIL PENELITIAN	29
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
3.2 Hasil Penelitian	33
BAB IV PEMBAHASAN	66
4.1 Bentuk <i>Money Politics</i> yang terjadi pada Pemilihan Wali Kota Palopo	66
4.2 <i>Money Politics</i> Mempengaruhi Keputusan Pemilih Pemula.....	68
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dugaan Money Politics	3
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	17
Gambar 3. Waktu Penelitian.....	21
Gambar 4. Peta Kota Makassar.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 5. Peta Kecamatan Sendana	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 6. Jenis Kelamin.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 7. Usia Responden	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 8. Agama Responden	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 9. Suku Responden	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 10. Pekerjaan Responden	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 11. Distribusi responden yang mengetahui bentuk money politics.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 12. Distribusi responden yang mengetahui adanya pembagian uang tunai	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 13. Distribusi responden yang pernah ditawarkan uang agar memilih calon tertentu	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 14. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan tentang adanya pembagian barang berupa sembako dari tim sukses	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 15. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan tentang adanya pembagian souvenir dengan pesan untuk memilih calon tertentu .	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 16. Distribusi responden yang pernah mendengar janji bantuan fasilitas umum	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 17. Distribusi responden yang pernah mendengar tawaran janji bantuan pendidikan/beasiswa jika memilih calon tertentu.	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 18. Distribusi responden yang pernah mendengar tawaran janji bantuan lapangan pekerjaan jika memilih calon tertentu...	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 19. Distribusi responden yang pernah mendengar tawaran janji bantuan kenaikan jabatan jika memilih calon tertentu.	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 20. Distribusi responden yang pernah mendengar janji bantuan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 21. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan tentang serangan fajar	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 22. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan tentang pemberian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 23. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan tentang pemberian <i>money politics</i> pada masa tenang menjelang pemilihan.	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 24. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan tentang pemberian <i>money politics</i> saat masa awal kampanye	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 25. Distribusi responden berdasarkan pemahaman bahwa pemberian money politics dilakukan secara sembunyi-sembunyi	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 26. Distribusi responden berdasarkan pemahaman bahwa money politics dilakukan secara langsung oleh tim sukses saat melakukan kunjungan ke rumah	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 27. Distribusi responden yang terpengaruh oleh pemberian uang tunai	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 28. Distribusi responden yang merasa lebih yakin memilih calon karena adanya pemberian barang	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Gambar 29. Distribusi responden yang terpengaruh oleh janji-janji politik.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

Bookmark tidak ditentukan.

Gambar 30. Distribusi responden yang mengutamakan money politics dibanding visi misi calon**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 31. Distribusi responden yang mengetahui efek memilih calon wali kota yang memberikan money politics**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 32. Distribusi responden berdasarkan ketersediaannya mengubah pilihan karena imbalan lebih besar**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 33. Distribusi responden berdasarkan pilihan yang dirasa paling menguntungkan**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 34. Distribusi responden berdasarkan anggapan bahwa money politics adalah sebuah keuntungan.....**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 35. Distribusi responden berdasarkan pemikiran rasional **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

Gambar 36. Distribusi responden berdasarkan perasaan rugi ketika menolak money politics**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2. Matriks Pengembangan Indikator	18
Tabel 3. Waktu Penelitian.....	21
Tabel 4. Tabel Uji Validitas	28
Tabel 5. Tabel Uji Reliabilitas	29
Tabel 6. Tabel. Hasil Uji Normalitas.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 7. Hasil Uji Linearitas	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 8. Hasil Uji Regresi.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 10. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini Indonesia merupakan negara hukum yang bersifat demokratis (Daud et al., 2023). Demokrasi sendiri adalah bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat disebuah negara, yang dijalankan oleh pemerintah. Setiap warga negara dalam hal ini berhak ikut serta terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menentukan keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka (Fitriani et al., 2019). Wujud demokratis itu berupa pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah (Pilkada). Menurut Bawaslu, pada masa awal kemerdekaan kepala daerah belum dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Pemerintah pusatlah yang memiliki peran dominan dalam menentukan kepala daerah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas negara. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Indonesia untuk pertama kalinya menerapkan sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung.

Sejak saat itu, Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dimana warga bebas untuk secara langsung memilih dan menentukan siapa yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah di wilayahnya masing-masing (Erviantono, 2017). Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020 dan 2024, ketika Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional. Pemilihan Kepala Daerah serentak dilaksanakan pada hari yang sama di ratusan kabupaten dan kota dengan tujuan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan, menyelaraskan masa jabatan kepala daerah serta memperkuat sistem demokrasi lokal. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia menunjukkan adanya transformasi dari sistem penunjukan dan perwakilan menuju sistem pemilihan langsung yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dimana rakyat memiliki hak penuh atas suaranya untuk memilih calon yang dianggap dapat memimpin daerah menjadi lebih baik. Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota secara langsung ini dianggap sebagai suatu kemajuan. Pemilihan Wali Kota dimaksudkan untuk memilih kepala daerah melalui mekanisme yang demokratis, bebas dan adil (Syarifudin, 2020). Namun dewasa ini, banyak pakar mengkonotasikan bahwa Pemilihan Wali Kota adalah wilayah (area) konflik. Dimana dalam area ini setiap orang maupun kelompok menginginkan memenangkan pertarungan untuk memperoleh kekuasaan. Oleh karena itu selalu ditemukan adanya konflik dalam Pemilihan Wali Kota baik dalam skala besar maupun skala kecil, sebab tidak jarang individu maupun kelompok menghalalkan segala cara termasuk yang dilarang untuk memenangkan pertarungan (Latief, 2019).

Studi-studi yang mengkaji masalah tersebut, misalnya studi yang dilakukan Dedi Irawan di Kalimantan Timur (tahun 2015). Arianto di Kalimantan Tengah (2018) dan Dendy Lukmajati di Jawa Timur (2014). Para peneliti ini menemukan, bahwa politik uang sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu atau tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan telah berlangsung massif pada setiap pemilihan kepala daerah dengan bentuk yang beragam yaitu ; (1) berbentuk uang dan (2) berbentuk fasilitas umum. Strategi politik uang juga dilakukan dengan cara yang berbeda, ada yang berbentuk serangan fajar menjelang hari H pemilihan dan ada juga dalam bentuk mobilisasi massa pada saat kampanye dan hari H pemilihan. Motif pelaku politik uang jelas adalah untuk meraih kemenangan dengan perolehan suara sebanyak banyaknya. Perkembangan politik di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi masyarakat masih diwarnai oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah dan perekonomian yang belum baik (didominasi kaum menengah ke bawah), membawa implikasi makin suburnya politik uang (*money politic*) didalam setiap event politik Pemilihan Wali Kota (Latief, 2019). Padahal dalam konteks demokrasi, politik uang itu adalah candu demokrasi. Sebab politik uang menghilangkan hak kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dengan cara mentransaksikan (membeli) kedaulatan tersebut dengan uang atau barang lainnya. Maraknya politik uang, kemudian berimplikasi pada integritas pemimpin yang dihasilkan. Korupsi menjadi hal lumrah yang dilakukan para Bupati, Wali kota dan Gubernur karena biaya yang dikeluarkan untuk menjadi pemimpin daerah sangat besar (termasuk didalamnya biaya *Money Politics*). Itulah sebabnya, politik uang dalam regulasi yang terkait Pemilihan Wali Kota dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran kampanye.

Dalam beberapa waktu belakangan ini, praktik *money politics* kerap menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi hasil pemilu, mengakibatkan penurunan kualitas pemilu serta perlahan lahan merusak integritas proses demokrasi di Indonesia (Kelana et al., 2022, Syarifudin, 2022). Politik uang ini juga dapat menyebabkan rendahnya kualitas partisipasi politik, transparansi dalam pemilihan dan menurunnya kredibilitas sistem demokrasi Indonesia. (Wibowo & Yusuf, 2022). Data yang diperoleh dalam beberapa pemilu secara jelas memperlihatkan bahwa meskipun sudah ada upaya dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk menghentikan praktik *money politics* ini, namun di lapangan yang terjadi justru sebaliknya. Politik uang masih tetap marak dilakukan, dengan banyaknya laporan yang mengindikasikan praktik ini terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah (Sutrisno & Prasetyo, 2021). Secara kasuistis, fenomena ini juga, terjadi di Sulsel, politik uang dalam setiap Pemilu maupun Pemilihan Wali Kota beberapa tahun lalu sangat marak. Sudah bukan rahasia lagi, pemimpin daerah khususnya di kabupaten/kota yang terpilih, pastilah melakukan praktek politik uang yang jor-joran.

Hasil penelitian Syarifudin (2022) menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam beberapa kasus menjadi terhambat disebabkan karena praktik politik uang yang menyebabkan banyaknya pemilih yang akhirnya lebih memilih untuk menerima uang daripada menilai calon berdasarkan visi-misi atau kualitas mereka dikarenakan praktik politik uang ini. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi

Selatan mencatat ada setidaknya 9 daerah yang masuk sebagai zona rawan pelanggaran politik uang di Pemilihan Wali Kota 2024. Dari 9 daerah tersebut, tiga diantaranya ada di wilayah Luwu Raya masing-masing Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Luwu Timur.

Kota Palopo dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu daerah dengan praktik *money politics* yang cukup tinggi pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota tahun 2024. Hal ini berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh *The Indonesian Social Research and Training Institute* dimana hasilnya menunjukkan bahwa sejumlah masyarakat menganggap *money politics* sebagai hal yang wajar. Pada berita yang diterbitkan oleh palopo pos juga menyebutkan bahwa terdapat sejumlah partai politik yang diduga keras melakukan kecurangan praktik *money politics* untuk meraih suara pada pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS). Besaran nominal *money politics* bahkan mencapai angka Rp1,5 juta persuara. Kejadian ini secara nyata telah merusak demokrasi pemilihan yang seharusnya menjunjung nilai-nilai integritas kejujuran.

Kecamatan Sendana dinilai oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik *money politics* pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Penilaian tersebut tidak muncul tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pengalaman dan temuan pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang menunjukkan adanya indikasi maupun kasus politik uang di wilayah tersebut. Adanya rekam jejak (track record) temuan *money politics* pada pemilu terdahulu menjadi indikator penting bagi Bawaslu dalam melakukan pemetaan kerawanan pemilu, karena praktik yang pernah terjadi di suatu wilayah memiliki potensi untuk kembali terulang.



Gambar 1. Dugaan Money Politics 1

Undang-Undang No.10 tahun 2008 terkait pemilihan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang untuk pertama kalinya memilih dan telah berusia setidaknya 17 tahun atau lebih dan mempunyai hak memilih dalam pemilihan kepala daerah. Sebagai pemilih pemula, mereka kerap dianggap sebagai pihak yang

tidak berpengalaman dalam memilih. Namun, ketiadaan pengalaman bukanlah menjadi keterbatasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pemilih pemula adalah pemilih yang ikut andil dalam menentukan pemimpin daerahnya. Bagaimana perilaku pemilih pemula pada saat memilih menjadi cerminan kualitas demokrasi pada saat ini dan masa yang akan datang. Karena kondisinya yang masih labil sehingga mudah mendapat pengaruh dari kalangan-kalangan partai politik yang berniat untuk curang (Rachmat & Esther, n.d.).

Pemilih pemula yang terdiri dari usia 17-21 tahun yang pertamakali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Kota sering dijadikan sebagai sasaran *money politics* karena minimnya pengetahuan dan pengalaman politik, kurangnya pemahaman mendalam tentang sistem demokrasi, serta lemahnya kesadaran tentang pentingnya memilih berdasarkan integritas calon menjadi sebuah faktor yang membuat pemilih pemula menjadi pihak yang rentan terhadap bujukan politik. Akibatnya keputusan memilih tidak lagi didasarkan pada visi, misi dan kapabilitas calon, melainkan karena adanya imbalan materi yang diberikan (Putri et al., 2025). Pemilih pemula cenderung melihat politik sebagai transaksi ekonomi daripada sebagai tanggung jawab sosial. Mereka lebih fokus pada keuntungan materi yang didapatkan daripada mempertimbangkan permasalahan bagaimana kualitas calon pemimpin (Alhajmi et al., 2024). Pemilih pemula seringkali lebih mempertimbangkan manfaat keuangan langsung daripada pertimbangan etis jangka panjang. Mereka menjadi kurang peduli terhadap integritas dan visi misi calon pemimpin, yang pada akhirnya merusak sistem demokrasi.

Penelitian ini menempatkan peneliti pada kajian sosiologi politik yang fokus pada perilaku memilih, khususnya pada pemilih pemula dalam Pemilihan Wali Kota Kota Palopo Tahun 2024. Peneliti memandang pemilih pemula bukan hanya sebagai kelompok yang pasif atau mudah dipengaruhi, tetapi sebagai individu yang memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam konteks penelitian ini, pemilih pemula dianggap sebagai aktor yang melakukan penilaian terhadap berbagai faktor yang dihadapi, termasuk praktik *money politics*. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional untuk menjelaskan bagaimana pemilih pemula mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan pribadi ketika menerima atau mengetahui adanya pemberian uang, barang, maupun janji politik, lalu mengaitkannya dengan keputusan memilih yang diambil.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, ditemukan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas praktik *money politics* secara umum atau meneliti perilaku pemilih masyarakat secara luas. Penelitian-penelitian tersebut umumnya belum secara khusus menempatkan pemilih pemula sebagai subjek utama, terutama dalam melihat proses pengambilan keputusan memilih. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum banyak yang mengkaji fenomena *money politics* di Kota Palopo, khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Wali Kota serentak tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian, baik dari sisi subjek penelitian, lokasi penelitian, maupun fokus kajian yang masih terbatas.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara khusus meneliti pengaruh *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula dengan mengambil lokasi di Kota Palopo. Penelitian ini juga menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan melihat pemilih pemula sebagai aktor rasional yang memiliki pertimbangan dalam menentukan pilihannya, bukan sekadar sebagai objek dari praktik politik uang. Selain itu, penelitian ini menghadirkan data empiris terbaru dari Pemilihan Wali Kota Palopo 2024 serta mengukur secara kuantitatif besarnya pengaruh *money politics* terhadap keputusan memilih. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi baru dalam kajian sosiologi politik, khususnya terkait perilaku pemilih pemula.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *money politics* yang terjadi pada pada Pemilihan Wali Kota Palopo tahun 2024 di Kelurahan Sendana?
2. Bagaimana pengaruh *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula pada Pemilihan Wali Kota Palopo tahun 2024 di Kelurahan Sendana?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi *money politics* yang terjadi pada pada Pemilihan Wali Kota Palopo tahun 2024 di Kelurahan Sendana
2. Untuk mengetahui pengaruh *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula Pemilihan Wali Kota Palopo tahun 2024 di Kelurahan Sendana

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya sosiologi politik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu terkait pengaruh *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula maupun isu-isu lain yang berkaitan.
2. Manfaat Akademik
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti yang lain yang meneliti topik yang sama, serta menambah wawasan akademik mengenai bagaimana pengaruh *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula.
3. Manfaat Praktis
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPU dalam pelaksanaan dan pengawasan proses Pemilihan Wali Kota agar meminimalisir

bahkan memberantas praktik *money politics*. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu melihat bagaimana tanggapan dan penilaian masyarakat dalam hal ini memilih pemula terhadap *praktik money politics*

1.4 Deskripsi Konsep, Teori dan Penelitian Terdahulu

1.4.1 Politik Uang (Money Politics)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendefinisikan politik uang sebagai upaya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilihan dengan imbalan tertentu agar memilih atau tidak memilih calon tertentu. Tujuannya adalah memengaruhi hasil pemilihan dengan cara-cara yang tidak etis dan melanggar hukum. Praktik politik uang bisa berbentuk pemberian uang tunai atau yang lebih dikenal dengan istilah (serangan fajar), transfer digital, paket sembako, kupon belanja, hadiah barang, bantuan komunitas atau organisasi, hingga janji proyek dan sebuah jabatan.

Menurut (Sacipto, 2019) *Money politics* pada dasarnya dipahami sebagai upaya mempengaruhi orang lain melalui pemberian imbalan materi, yang sering kali dipadankan dengan praktik jual beli suara dalam proses politik dan perebutan kekuasaan. Praktik ini dapat berupa pembagian uang baik yang berasal dari kantong pribadi seorang kandidat maupun dari partai politik yang ditujukan untuk mengarahkan pilihan pemilih (voters). Semua bentuk imbalan yang disertai motif politik termasuk kategori politik uang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan tegas melarang praktik ini. Pasal 73 menyebutkan bahwa calon, tim kampanye, partai politik, maupun pihak lain dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pelanggar dapat dikenai pidana penjara 3 hingga 6 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar, bahkan pemilih yang menerima pun dapat dikenakan hukuman yang sama.

Pengertian politik uang dapat diperluas sebagai tindakan memberikan uang, barang, atau janji-janji tertentu kepada pemilih baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan memperoleh keuntungan politik (Putra, 2018). Secara lebih umum, politik uang dapat dipahami sebagai usaha mempengaruhi perilaku seseorang melalui pemberian imbalan tertentu. Definisi ini mencakup berbagai bentuk cara yang digunakan, motif di balik tindakan tersebut, serta kesadaran pelaku dalam melakukannya. Praktik ini pada dasarnya diarahkan untuk mendorong individu bertindak sesuai dengan kepentingan pihak yang melakukan politik uang. Adapun bentuk *money politics*:

1. Berbentuk Uang Tunai

Money politics atau politik uang sering kali terjadi menjelang pemilihan, upaya ini digunakan sebagai senjata para calon kepala daerah untuk berusaha memengaruhi pilihan para pemilih dengan memberikan sebuah imbalan berbentuk uang tunai yang kerap kali diistilahkan sebagai serangan fajar. Serangan fajar ini dilakukan dengan memberikan uang kepada

pemilih pada subuh sebelum hari pencoblosan atau beberapa hari sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maifizar et al., 2025 menunjukkan bahwa praktik serangan fajar ini telah terbukti dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan calon kandidat yang melakukan serangan fajar cenderung mendapatkan lebih banyak suara dibandingkan dengan kandidat yang tidak melakukannya. Serangan fajar sudah melekat pada budaya masyarakat di Indonesia

2. Berbentuk Barang

Money politics berbentuk barang sering terjadi di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Para pelaku politik uang memberikan barang berharga kepada pemilih seperti bahan pokok (sembako), alat-alat elektronik dan lain lain. Pemberian barang ini biasanya dilakukan dalam bentuk paket atau hadiah dengan tujuan agar penerima memilih calon tertentu di hari pemilihan (Arqon et al., 2024).

3. Berbentuk Janji

Money politics bentuk ini biasanya dilakukan oleh para kandidat yang memiliki elektabilitas yang rendah. Para kandidat calon pemimpin menjanjikan berbagai macam hal kepada pemilih, seperti pembangunan infrastruktur, menyediakan lapangan kerja khusus bagi para pemilih, dan bantuan bantuan sosial lainnya (Arqon et al., 2024).

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya *money politics* menurut (Fitriani et al., 2019) adalah sebagai berikut :

1. Faktor Keterbatasan Ekonomi

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berdiri secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politisi dalam pemilu. Praktek politik uang tidak akan mudah untuk dicegah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat Indonesia.

2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang

terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktik politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi.

3. Faktor Lemahnya Pengawasan

Praktek politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerja sama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktik politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Lemahnya pengawasan ini lebih menitikberatkan kepada adaptasi individu terhadap peraturan yang mengawasi praktik politik uang itu sendiri, dimana karena faktor rendahnya pendidikan juga berpengaruh kepada pola pikir masyarakat, sehingga belum mampu memahami dan menginternalisasi dengan baik terkait peraturan pengawasan yang harusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek politik uang di masyarakat.

4. Faktor Kebiasaan dan Tradisi

Praktek politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi sebuah kebiasaan yang sulit diubah. Dampak ini diakibatkan karena praktek politik uang yang terjadi selama ini mulai dianggap sebagai hal lumrah. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu. Keteidaktahuan masyarakat akan hal itu, membuat praktek politik uang ini menjadi terus berulang-ulang, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu, dan membuat masyarakat berfikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola pikir masyarakat akan hal itu, menyebabkan praktek politik uang menjadi sering dilakukan terutama saat masa pemilu.

1.4.2 Keputusan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keputusan diartikan sebagai perihal yang berkaitan dengan putusan, segala putusan yang telah ditetapkan sesudah dipertimbangkan dan dipikirkan. Keputusan merupakan hasil dari pemilihan alternatif di antara berbagai pilihan yang tersedia, sementara pengambilan keputusan merujuk pada rangkaian proses yang dilalui hingga diperolehnya keputusan tersebut. Dalam konteks politik, pengambilan keputusan menjadi konsep yang fundamental karena berkaitan dengan keputusan kolektif (Arif, 2023).

Pada dasarnya manusia adalah makhluk pembuat keputusan (decision making man), pengambil keputusan, penentu atas pilihan dari berbagai pilihan. Sepanjang hidup manusia terjadi pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa sepanjang kehidupan manusia selalu diisi oleh pengambilan keputusan. Hal ini dapat dikatakan bahwa “tidak ada saat tanpa pengambilan keputusan”. Karena Pengambilan keputusan merupakan prasyarat untuk menentukan pilihan tindakan atau perilaku. Sedangkan yang dimaksud pengambilan Keputusan adalah merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan atau digunakan untuk membuat keputusan. Pengambilan keputusan adalah “merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti atau untuk digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah”. Pengambilan keputusan memilih berbagai alternatif yang paling menguntungkan.

Dalam penelitian ini, pengambilan keputusan merupakan proses ketika pemilih pemula menggunakan segala informasi yang mereka miliki untuk menentukan pilihan politik. Langkah ini dapat menghasilkan keputusan yang tepat ataupun keliru, keputusan tergantung pada kualitas informasi yang diterima. Faktor seperti aktivitas partai politik, kampanye, *money politics*, serta dorongan terbuka dari lingkungan sosial tertentu turut memengaruhi cara pemilih pemula menentukan pilihannya (Pasolong, 2023).

1.4.3 Pemilih Pemula

Sentosa dan Karya dalam bukunya menyebutkan bahwa setiap kali pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota dilaksanakan selalu menghadirkan kelompok pemilih pemula pada setiap periode pelaksanaannya, kelompok ini selalu berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk, dengan kriteria usia 17 tahun hingga 21 tahun pada saat Pemilihan Wali Kota digelar maka kelompok ini dikategorikan sebagai pemilih pemula.

Menurut Rachmat & Esther (2016) Pemilih pemula yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia memilih. Menurut pasal 1 ayat (22) UU No. 10 Tahun 2008, pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih. Kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih dan didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Dapat disederhanakan bahwa pemilih pemula merupakan pemilih yang melaksanakan pemilu pertamakali. Pemilih pemula menjadi sasaran favorit bagi calon kandidat atau partai politik dalam mendapatkan atensi suara pada saat pemilihan. Jika pemilih pemula tidak memiliki wawasan mendalam tentang politik maka mereka sangat berisiko untuk mudah dipengaruhi (Andriyendi. et al., 2023). Dengan berbekal pengalaman pertama yang sangat minim, maka tidak jarang kelompok pemilih pemula ini memberikan prospek

yang menjanjikan untuk dipengaruhi oleh partai politik atau calon tertentu guna mendapatkan suara yang lebih banyak untuk memenangkan pemilihan.

Dari Pengertian diatas dapat di tarik simpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang di daftar oleh penyelenggara Pemilihan Wali Kota dalam daftar pilkada. Dan baru mengikuti Pemilihan Wali Kota (memberikan suara) pertama kali sejak Pemilihan Wali Kota yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa serta pekerja muda.

1.4.4 PILKADA/Pemilihan Wali Kota

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang disebut dengan Pemilihan Wali Kota adalah bentuk pemilihan umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pemilihan Wali Kota merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis melalui penyempurnaan dalam penyelenggaraannya. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Namun demikian, setiap calon wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, di antaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, serta berusia paling rendah 25 tahun. Selain itu, calon juga disyaratkan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016, pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pemilihan Wali Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Peserta

Pemilihan Wali Kota adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung pada prinsipnya disesuaikan dengan dinamika politik di tingkat lokal, dimana daerah-daerah selama ini merasa kurang diberi kebebasan dalam partisipasi politik menentukan pemimpin di daerahnya bisa memilih. Pemilihan Kepala Daerah dinilai sebagai penuntun bagi jalan keluar dari segala persoalan yang dihadapi oleh daerah seperti ketertinggalan, pembangunan dan keterbelakangan kesejahteraan masyarakat di daerah, kemiskinan, pengangguran dan tingkat kriminalitas semakin tinggi. Sehingga dibutuhkan kepala daerah yang tangguh dan tanggap dengan persoalan kebutuhan daerah (Arafat et al., 2022).

Pemilihan Wali Kota merupakan bagian dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, Pemilihan Wali Kota menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang akan menjalankan pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota selama lima tahun ke depan.

1.4.5 Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James Samuel Coleman memandang bahwa tindakan seseorang mengarah pada sebuah tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Ada 2 unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan aktor adalah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini, aktor ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan sebaik baiknya. Aktor dipandang sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang kemudian digunakan untuk menentukan suatu pilihan dengan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya. Aktor mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan sesuai keinginannya. Sehingga aktor memiliki kontrol untuk mengendalikan sumber daya (Saraswati, 2019).

Riitzer dalam bukunya teori sosiologi klasik (2019), juga menyebutkan bahwa aktor menjadi fokus teori pilihan rasional. Aktor dipandang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Jadi aktor memiliki sasaran tindakan mereka. Aktor juga dipandang memiliki preferensi berupa nilai dan kepuasan. Teori pilihan rasional tidak berurusan dengan preferensi tersebut. Melainkan fokus pada fakta bahwa tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai preferensi aktor. Menurut Riitzer meskipun teori pilihan rasional berangkat dari tujuan dan maksud aktor, paling tidak ada sebuah hambatan yang terjadi. Yakni kelangkaan sumber daya. Aktor memiliki sumber daya yang berbeda beda. Bagi mereka yang memiliki banyak sumber daya, tercapainya tujuan mungkin akan relatif mudah. Namun sebaliknya, bagi mereka yang hanya memiliki

sedikit sumber daya, tercapainya tujuan mungkin sulit bahkan tidak mungkin.

Dalam penelitian ini, teori pilihan rasional James Samuel Coleman digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemilih pemula menentukan pilihannya secara sadar. Teori ini melihat pemilih pemula sebagai individu yang memiliki tujuan dan kepentingan tertentu ketika berhadapan dengan proses pemilihan. Pemilih pemula tidak hanya sekadar mengikuti arahan orang lain, tetapi dipandang sebagai aktor yang mampu berpikir, menilai, dan memilih berdasarkan pertimbangan yang dianggap paling menguntungkan bagi dirinya.

Dalam konteks Pilkada, praktik *money politics* dapat dipahami sebagai salah satu sumber daya yang memengaruhi pertimbangan pemilih pemula. Pemberian uang, barang atau jabatan yang diterima menjelang pemilihan memiliki nilai tertentu bagi pemilih, terutama bagi mereka yang masih dalam tahap awal mengenal dunia politik dan belum memiliki ikatan kuat dengan partai atau kandidat tertentu. Berdasarkan cara pandang Coleman, pemilih pemula akan mempertimbangkan manfaat langsung yang diperoleh dari *money politics* dibandingkan dengan pertimbangan lain, seperti visi-misi calon, rekam jejak, atau kepentingan jangka panjang. Jika manfaat yang diterima dirasa lebih nyata dan mendesak, maka hal tersebut dapat memengaruhi keputusan memilih.

1.4.6 Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini, penulis membahas beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat sejauh mana topik tersebut telah dikaji oleh peneliti sebelumnya serta untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Dari hasil kajian tersebut, dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Hansiden & Supit, (2025)	Pengaruh <i>Money Politik</i> terhadap Keputusan memilih pemilih di Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2024.	Pendekatan Kuantitatif dengan metode survey terhadap 348 responden yang dipilih dengan Teknik random sampling.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 40,8% responden pernah menerima uang/barang dan 53,3% menyatakan bahwa hal tersebut memengaruhi Keputusan memilih mereka. Uang tunai

			merupakan bentuk paling dominan (87,6%) dan mayoritas pemberian dilakukan saat kampanye atau hari pemilihan.
Wahyu et al., (2025)	Praktek <i>money politics</i> dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024	Kualitatif menggunakan metode deskriptif. Metode yang diterapkan adalah analisis data, dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan adanya praktek <i>money politics</i> yang terjadi berupa pemberian uang pada Masyarakat, bantuan pembangunan mushalla, pemberian batu pasir pada jalan pelosok yang belum diaspal, pembuatan saluran irigasi persawahan, menjanjikan posisi sebagai sekretariat Nagari, dan pemberian paket sembako. Praktek <i>money politics</i> yang terjadi di Nagari Ladang Panjang justru mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat kelas menengah, masyarakat pinggiran, pemuda/pemudi, tokoh adat maupun tokoh agama.
Hidayatullah (2022)	Dampak <i>money politics</i> terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum anggota legislative pada tahun	Kualitatif dengan menggunakan pendekatan behavior yang menitikberatkan pada gagasan serta implementasi yang membangun jawaban rumusan	Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya <i>money politics</i> dalam pemilihan umum anggota legislatif yakni faktor keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya

	2019 di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah	masalah penelitian. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.	kualitas Pendidikan politik, kebiasaan dalam pemilu dan kesepakatan kerja antara pemilik. Kedua, dampak yang ditimbulkan dari politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah baru lainnya dalam masyarakat maupun pemerintah, sehingga membawa dampak negative yang bersifat jangka Panjang.
Sofia et al., (2023)	Realita perilaku pemilih dalam perspektif mahasiswa terkait <i>money politcs</i>	Kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi Pustaka	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat Adalah pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. (2) Proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung oleh kandidat atau kontestan politik tertentu dan dilakukan secara langsung melalui perantara orang lain. (3) Dampak yang ditimbulkan dari praktik politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah baru lainnya di masyarakat dan pemerintahan, sehingga

			membawa dampak negative jangka Panjang.
Fauzan F., M. (2025).	<i>Money politik</i> dalam perilaku pemilih (studi kasus Pemilihan Wali Kota serentak tahun 2018 pada kecamatan Pajukukang kabupaten bantaeng)	Kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam serta teknik analisis data yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kecamatan Pajukukang kebanyakan adalah pemilih rasional, kemudian pelanggaran money politik yang bisa dibuktikan dan bisa sampai kepada keputusan pengadilan hanya kasus yang tertangkap tangan langsung di Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang. garan Pemilihan Wali Kota membuat masyarakat di Kecamatan Pajukukang mudah disusupi dengan pelanggaran Pemilihan Wali Kota seperti money politik oleh jaringan orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu pada tabel tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah perbedaan yang menunjukkan letak kebaruan dalam penelitian ini. Sebagai perbandingan untuk melihat kebaruan penelitian ini, berikut aspek perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Perbedaan

- a. Penelitian terdahulu pada tabel tersebut belum ada yang menjadikan pemilih pemula sebagai subjek penelitiannya.
- b. Penelitian terdahulu pada tabel tersebut belum ada yang menjadikan Kota Palopo sebagai lokasi penelitian, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengambil lokasi penelitian di Kota Palopo.

2. Persamaan

- a. Penelitian terdahulu pada tabel dengan penelitian ini sama-sama menempatkan *money politics* sebagai objek kajian utama.
- b. Penelitian terdahulu pada tabel tersebut dengan penelitian ini sama-sama menunjukkan adanya praktik *money politics* di masyarakat.

1.10 Alur Kerangka Konseptual

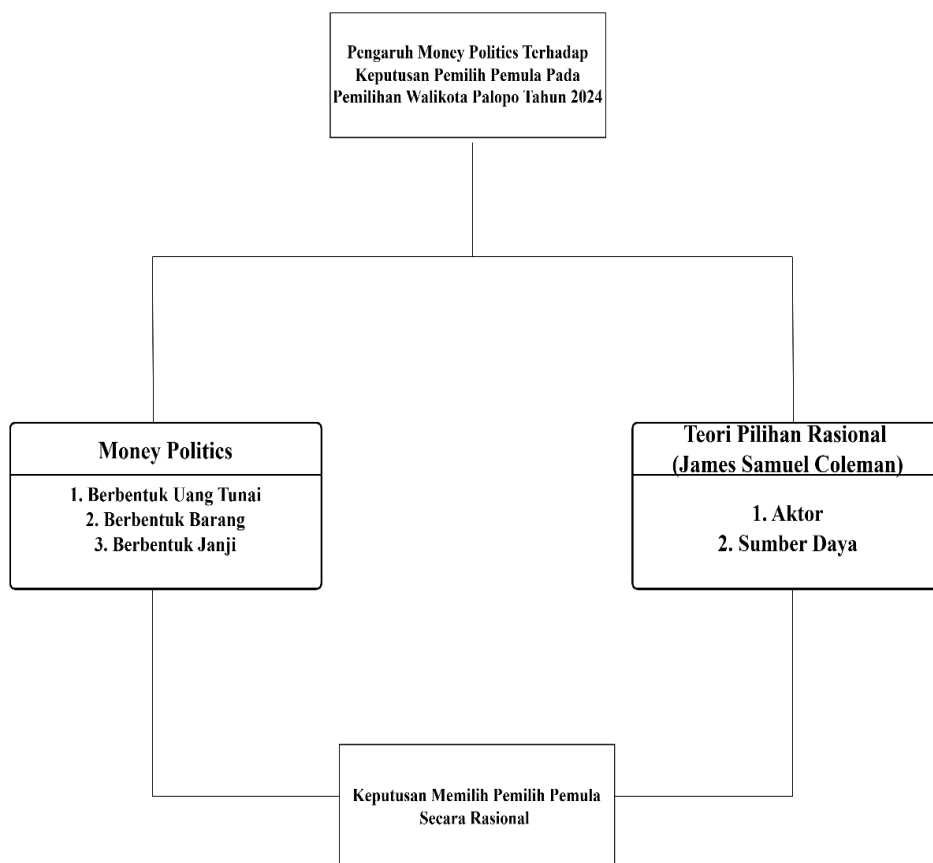
Kerangka konsep dalam penelitian ini berangkat dari realita bahwa Pemilihan Wali Kota merupakan proses politik yang melibatkan masyarakat sebagai penentu utama melalui hak pilihnya. Salah satu kelompok pemilih yang memiliki peran penting dalam Pemilihan Wali Kota adalah pemilih pemula, yaitu warga yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula umumnya masih berada pada tahap belajar memahami politik, sehingga cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

Salah satu faktor eksternal yang sering muncul dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Wali Kota adalah *money politics*. Praktik *money politics* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, pemberian barang atau sembako, hingga janji tertentu dari kandidat atau tim sukses. Praktik ini bertujuan untuk memengaruhi sikap dan pilihan pemilih agar mendukung kandidat tertentu.

Dalam kerangka pikir ini, *money politics* ditempatkan sebagai variabel independen, karena dianggap sebagai faktor yang memengaruhi perilaku politik pemilih. Sementara itu, keputusan pemilih pemula menjadi variabel dependen, yaitu hasil dari proses pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya pada saat Pemilihan.

Penelitian ini melihat bahwa ketika pemilih pemula menerima atau mengetahui adanya praktik *money politics*, hal tersebut dapat memengaruhi cara mereka menilai kandidat, membentuk sikap politik, dan akhirnya menentukan pilihan politiknya. Semakin kuat intensitas dan bentuk *money politics* yang diterima, maka semakin besar kemungkinan keputusan pemilih pemula dipengaruhi oleh praktik tersebut.

Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara *money politics* dan keputusan pemilih pemula. Kerangka ini digunakan sebagai dasar untuk menguji apakah *money politics* benar-benar berpengaruh terhadap keputusan pemilih pemula pada Pemilihan Wali Kota Palopo Tahun 2024.



Gambar 2. Kerangka Pikir

1.11 Hipotesis

Hipotesis penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

H0: Tidak terdapat pengaruh antara *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula pada Pemilihan Wali Kota Palopo tahun 2024.

H1: Terdapat pengaruh antara *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula pada Pemilihan Wali Kota Palopo tahun 2024.

1.12 Defini Operasional

1. Money Politics (X)

Money politics dalam penelitian ini didefinisikan sebagai segala bentuk pemberian imbalan materi maupun janji tertentu yang dilakukan oleh calon kepala daerah, tim kampanye, atau pihak lain dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih pemula pada Pemilihan Kota Palopo Tahun 2024. Pemberian tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung selama tahapan Pemilihan Wali Kota berlangsung. Secara operasional, variabel *money politics* diukur melalui persepsi dan pengalaman responden terkait praktik pemberian uang tunai, barang atau jasa, serta janji jabatan atau keuntungan politik lainnya. Pengukuran

dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert berdasarkan indikator bentuk pemberian, waktu pemberian, dan cara pemberian *money politics*.

2. Keputusan Pemilih Pemula (Y)

Keputusan pemilih pemula dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pilihan politik yang diambil oleh pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Kota Tahun 2024. Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses pertimbangan individu terhadap berbagai faktor yang memengaruhi perilaku memilih. Secara operasional, keputusan pemilih pemula diukur melalui sejauh mana praktik *money politics* memengaruhi pertimbangan dan pilihan responden dalam menentukan kandidat yang dipilih. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert berdasarkan indikator pengaruh pemberian uang, barang atau jasa, janji politik, perubahan preferensi memilih, serta pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan

1.13 Matriks Pengembangan Indikator

Tabel 2. Matriks Pengembangan Indikator

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Parameter Ukur	Skala
1.	<i>Money Politics</i> (X)	Bentuk Pemberian	Pemberian Uang Tunai	Responden pernah menerima atau mengetahui adanya pemberian uang tunai dari calon/tim sukses	Linkert
			Pemberian Barang	Responden pernah menerima atau mengetahui adanya pemberian barang (sembako, bantuan dan hadiah)	
			Janji jabatan/Keuntungan politik	Responden mengetahui atau menerima janji jabatan, bantuan atau keuntungan tertentu.	
		Waktu Pemberian	Waktu Pemberian	Pemberian dilakukan menjelang/pada hari pemungutan suara	
		Cara Pemberian	Cara Pemberian	Pemberian dilakukan secara langsung oleh kandidat atau melalui perantara.	

2.	Keputusan Pemilih Pemula (Y)	Pertimbangan Memilih	Pengaruh Uang Terhadap Pilihan Pemilih Pemula	Uang memengaruhi keputusan memilih kandidat tertentu	Linkert
			Pengaruh barang/jasa terhadap pilihan	Barang atau jasa memengaruhi keputusan memilih	
			Pengaruh janji terhadap pilihan	Janji jabatan atau bantuan memengaruhi keputusan memilih	
		Perubahan Preferensi	Perubahan pilihan	Responden mengubah pilihan karena adanya pemberian atau janji	
		Rasionalitas Memilih	Pertimbangan rasional	Responden mempertimbangkan keuntungan pribadi dalam memilih	

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan, Tipe dan Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini dikarenakan data-data yang terkumpul berupa angka-angka kemudian akan dianalisis menggunakan analisis statistika. Pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif terdapat variabel dimana variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Penelitian kuantitatif sangat menekankan pada hasil yang objektif, melalui penyebaran kuesioner data bisa diperoleh dengan objektif dan diuji menggunakan proses uji validitas dan uji realibilitas (Sahir, 2021). Penelitian ini akan mengukur secara objektif pengaruh antara *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula pada Pemilihan Wali Kota Palopo tahun 2024.

Tipe penelitian menggunakan tipe kuantitatif deskriptif karena penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai karakteristik suatu fenomena atau kondisi pada populasi tertentu. Data yang akan disajikan adalah data kuantitatif yang diperoleh dari keadaan sesungguhnya di lapangan, yang kemudian dianalisis untuk menggambarkan variabel secara apa adanya. Melalui tipe penelitian ini, hasil yang didapat akan menjadi deskripsi yang jelas dan terstruktur mengenai fenomena yang diteliti, didukung oleh data-data berupa angka yang telah diolah.

Strategi penelitian yang digunakan adalah survei. Strategi ini digunakan sebab mampu mengumpulkan data dari responden dalam jumlah yang relatif besar, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran umum di Kelurahan Sendana yang mewakili populasi pemilih pemula di Kota Palopo. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang berisi butir-butir pertanyaan terstruktur berdasarkan variabel penelitian.

2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

2.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai Januari hingga Juni 2026. Kurun waktu tersebut melibatkan seluruh proses, dimulai dari tahap penyusunan proposal penelitian hingga pengolahan data hasil penelitian. Lokasi pelaksanaan penelitian ditetapkan di Kota Palopo, Kecamatan Sendana, Kelurahan Sendana. Pemilihan lokasi ini berdasarkan tingginya fenomena *money politics* yang ditemukan Bawaslu Kota Palopo di daerah ini. Rincian mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan penelitian disajikan dalam bentuk tabel berikut.

2.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3. Waktu Penelitian

No	Nama kegiatan	2026					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1.	Persiapan dan penyusunan Proposal						
2.	Bimbingan Proposal Penelitian						
3.	Seminar Proposal Penelitian						
4.	Pengurusan Surat Izin Penelitian						
5.	Pengumpulan data penelitian						
6.	Pengolahan Data penelitian						
7.	Penyusunan laporan hasil penelitian						
8.	Seminar hasil penelitian						

2.3 Populasi dan Sample

2.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini merupakan pemilih pemula yang berusia 17-21 tahun di Kelurahan Sendana, Kecamatan Sendana, Kota Palopo. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 87 orang dan jumlah perempuan sebanyak 88. Jumlah total sebanyak 175 menurut data kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palopo tahun 2024.

JUMLAH PENDUDUK USIA 17-21 TAHUN
(SUMBER DATA BERDASARKAN AGREGAT DKB SEMESTER II TAHUN 2024)

NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK USIA 17-21 TAHUN		
		(LK)	(PR)	(JML)
1	2	3	4	5
1	WARA	1,296	1,258	2,554
	TOMPOTIKKA	174	172	346
	BOTING	267	287	554
	AMMASANGAN	178	163	341
	LAGALIGO	240	204	444
	DANGERAKKO	171	183	354
	PAJALESANG	266	249	515
2	WARA UTARA	872	876	1,748
	BATUPASI	49	62	111
	SABBAMPARU	171	173	344
	SALOBULO	280	273	553
	PENGGOLI	132	120	252
	LUMINDA	88	82	170
	PATTENE	152	166	318
3	WARA SELATAN	764	767	1,531
	TAKKALALA	284	301	585
	SONGKA	245	231	476
	SAMPODDO	111	109	220
	BINTURU	124	126	250
4	TELLUWANUA	760	761	1,521
	MAROANGIN	101	111	212
	MANCANI	116	126	242
	SUMARAMBU	76	75	151
	SALUBATTANG	62	45	107
	JAYA	196	190	386
	BATU WALENRANG	90	111	201
	PENTOJANGAN	119	103	222
5	WARA TIMUR	1,762	1,708	3,470
	SURUTANGA	275	258	533
	BENTENG	300	304	604
	PONTAP	396	387	783
	MALATUNRUNG	160	144	304
	SALEKOE	266	276	542
	SALUTELLUE	111	113	224
	PONJALAE	254	226	480
6	WARA BARAT	517	489	1,006
	TAMARUNDUNG	157	157	314
	BATTANG	77	85	162
	LEBANG	153	137	290

	BATTANG BARAT	53	45	98
	PADANG LAMBE	77	65	142
7	SENDANA	369	347	716
	MAWA	73	67	140
	PURANGI	117	116	233
	PETA	92	76	168
	SENDANA	87	88	175
8	MUNGKAJANG	448	403	851
	MUNGKAJANG	173	154	327
	MURANTE	133	148	281
	LATUPPA	71	57	128
	KAMBO	71	44	115
9	BARA	1,312	1,238	2,550
	TEMMALEBBA	342	338	680
	BALANDAI	269	233	502
	RAMPOANG	284	270	554
	TO'BULUNG	226	225	451
	BUNTU DATU	191	172	363
	KOTA PALOPO	8,100	7,847	15,947

2.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul betul representatif atau mewakili (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Margin of error

Melalui rumus di atas, maka jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

$$= \frac{175}{1 + 175 (0,1)^2}$$

$$= \frac{175}{1 + 175 (0,01)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{175}{1 + 1,75} \\
 &= \frac{175}{2,75} \\
 &= 63,63 \\
 &= 64
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut diperoleh nilai sebesar 63,63 yang kemudian dibulatkan menjadi 64 sampel. Setelah ditentukan bahwa jumlah akhir sampel sebanyak 64 responden menggunakan rumus Slovin, penelitian ini menggunakan teknik probability sampling sebagai teknik pengambilan sampel karena memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Adapun teknik *probability sampling* yang digunakan adalah *cluster sampling* (sampling kluster). Teknik cluster sampling digunakan karena populasi penelitian berada dalam wilayah yang terbagi ke dalam beberapa kelompok atau kluster berdasarkan wilayah administrasi. Kecamatan Sendana terdiri atas beberapa kelurahan yang dijadikan sebagai kluster penelitian. Dalam penelitian ini, Kelurahan Sendana ditetapkan sebagai kluster penelitian yang mewakili wilayah Kecamatan Sendana. Setelah kluster penelitian ditetapkan, penentuan responden dilakukan pada populasi pemilih pemula yang berada di Kelurahan Sendana. Dengan demikian, setiap anggota populasi dalam kluster yang telah ditetapkan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi responden penelitian sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi maupun cara-cara yang akan digunakan peneliti dalam pengumpulan data di lapangan, agar penelitian yang dilakukan dapat menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana pemilih pemula di Kelurahan Sendana, Kota Palopo mengambil keputusan untuk memilih calon wali kota. Dalam observasi tersebut

2. Kuesioner

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data berbentuk kuantitatif dari para responden. Kuesioner ini berupa sejumlah pertanyaan tertutup dan semi terbuka yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian.

3. Wawancara Terstruktur

Teknik wawancara terstruktur dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada responden. Wawancara bertujuan guna

memperkuat data hasil kuesioner dan observasi, juga menggali informasi lebih dalam.

2.5 Jenis Data

Menurut (Bungin, 2018) dalam konteks metodologi penelitian, ada ada dua jenis data dalam penelitian secara umum yaitu :

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan dalam bentuk Google Form kepada responden yang memenuhi kriteria. Kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan tertutup sesuai dengan variabel, indikator, dan parameter ukur yang telah dijabarkan dalam matriks pengembangan indikator.

2. Data Sekunder

Data sekunder Adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang mendukung data primer. Data ini didapatkan melalui studi dokumentasi, yakni penelusuran berbagai sumber berbentuk tulisan dan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dukcapil tentang jumlah penduduk Kota Palopo berdasarkan rentan usia, data dari Bawaslu dan KPU Kota Palopo, kajian literatur artikel, jurnal serta buku yang dapat menunjang data penelitian.

2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Tujuannya adalah untuk memberikan makna pada data tersebut sehingga hasil penelitian dapat dipahami secara jelas dan informatif oleh pembaca (Bungin, 2018).

Dalam penelitian ini, tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan meliputi:

1. *Editing* data, meliputi pengecekan dan perbaikan data pada kuesioner penelitian untuk memastikan data tersebut lengkap, konsisten dan jelas.
2. Pengkodean data, yaitu proses memberikan tanda berupa angka pada setiap data yang telah dikumpulkan dari responden untuk di klasifikasikan dan mudah untuk di analisis.
3. Input Data, yakni data yang telah diberi kode kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 27 untuk dianalisis.
4. Membersihkan Data dilakukan pengecekan pada setiap data yang telah diinput ke dalam SPSS untuk memastikan tidak terdapat kesalahan dalam proses entri, duplikasi, ataupun data yang tidak konsisten.
5. Hasil Analisis, yakni menyajikan data yang telah diolah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, diagram lingkaran atau diagram batang agar memudahkan pembaca.
6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mengolah, menyusun, dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari lapangan agar menghasilkan

kesimpulan yang bermakna dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Proses ini mencakup kegiatan pengorganisasian data ke dalam kategori, pengkodean, tabulasi, serta analisis menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 27 for Windows.

a. Uji Normalitas

Sebelum dilakukan uji hipotesis, data terlebih dahulu diuji normalitasnya untuk mengetahui apakah distribusi data dari kedua variabel bersifat normal atau tidak. Uji normalitas ini penting dilakukan karena menjadi dasar pemilihan analisis statistik yang tepat. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov melalui program SPSS versi 27. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Sig. > 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal.
- Jika nilai Sig. < 0,05 maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas ini menentukan apakah analisis selanjutnya menggunakan uji parametrik atau nonparametrik.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel pengaruh *money politics* dengan variabel terpengaruh keputusan pemilih pemula. Pengujian ini akan dilakukan dengan bantuan SPSS versi 27 dengan kriteria :

- Jika nilai Sig. > 0,05 maka hubungan antara kedua variabel bersifat linear.
- Jika nilai Sig.) < 0,05 maka hubungan antara kedua variabel tidak linear.

Apabila hubungan antara variabel bersifat linear, maka uji regresi dan uji hipotesis dapat dilanjutkan.

c. Analisis Regresi Linear Sederhana

Bentuk analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *money politics* (X) terhadap keputusan pemilih pemula (Y). Pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS versi 27. Analisis ini bertujuan untuk melihat arah dan kekuatan pengaruh *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula, apakah pengaruh tersebut positif atau negatif, serta signifikan atau tidak.

d. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji kebenaran dugaan yang diajukan dalam penelitian, yaitu:

- H_0 (Hipotesis Nol): Tidak terdapat pengaruh antara *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula pada Pemilihan Wali Kota Kota Palopo tahun 2024.

- H_a (Hipotesis Alternatif): Terdapat pengaruh antara *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula pada Pemilihan Wali Kota Kota Palopo tahun 2024.

Pengujian dilakukan menggunakan uji t (parsial) pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, dengan kriteria keputusan:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dengan demikian, hasil uji t akan menunjukkan apakah *money politics* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemilih pemula.

e. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen (*money politics*) terhadap variabel dependen (keputusan pemilih pemula). Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1.

- Besar nilai R^2 mendekati 1, menunjukkan bahwa semakin besar pula pengaruh *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula.
- Besar nilai R^2 mendekati 0, menunjukkan bahwa pengaruh *money politics* terhadap keputusan pemilih pemula relatif kecil.

Analisis ini membantu peneliti mengetahui proporsi variasi *money politics* yang dapat dijelaskan oleh keputusan pemilih pemula sebagai variabel bebas.

2.7 Pengujian Keabsahan Data

1. Uji Validitas

Validitas adalah Uji coba pertanyaan penelitian dengan tujuan untuk melihat sejauh mana responden mengerti akan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jika hasil tidak valid maka ada kemungkinan bahwa responden tidak mengerti dengan pertanyaan yang diajukan. Dalam konteks penelitian ini, hasil uji validitas penelitian ini bergantung pada instrumen yang disusun sebagai alat untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Variabel tersebut yaitu *money politics* dan keputusan pemilih pemula. Sehingga kuesioner yang digunakan telah disusun sebaik mungkin guna memastikan bahwa butir-butir pertanyaannya benar-benar mewakili aspek *money politics* (bentuk pemberian, waktu pemberian dan cara pemberian) dan keputusan pemilih pemula (pertimbangan memilih, perubahan preferensi dan rasionalitas memilih).

Dalam penelitian ini digunakan *correlation pearson product-moment* melalui software spss 27 for windows untuk uji validitas. Instrumen penelitian diasumsikan valid apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Instrumen dikatakan valid, apabila nilai dari signifikansi lebih besar dari 10% atau 0,1 dan diperoleh r_{tabel} sebesar 0,194
2. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya valid.
3. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya tidak valid.

Tabel 4. Tabel Uji Validitas

No	Variabel	rHitung	rTabel	Keterangan
1.	B1	0,426	0,242	Valid
2.	B2	0,466	0,242	Valid
3.	B3	0,451	0,242	Valid
4.	B4	0,472	0,242	Valid
5.	B5	0,563	0,242	Valid
6.	B6	0,615	0,242	Valid
7.	B7	0,631	0,242	Valid
8.	B8	0,683	0,242	Valid
9.	B9	0,716	0,242	Valid
10.	B10	0,688	0,242	Valid
11.	C1	0,710	0,242	Valid
12.	C2	0,575	0,242	Valid
13.	C3	0,590	0,242	Valid
14.	C4	0,600	0,242	Valid
15.	C5	0,525	0,242	Valid
16.	C6	0,530	0,242	Valid
17.	D1	0,461	0,242	Valid
18.	D2	0,580	0,242	Valid
19.	D3	0,397	0,242	Valid
20.	D4	0,-042	0,242	Tidak Valid
21.	D5	0,434	0,242	Valid
22.	D6	0,477	0,242	Valid
23.	E1	0,609	0,242	Valid
24.	E2	0,584	0,242	Valid
25.	F1	0,427	0,242	Valid
26.	F2	0,658	0,242	Valid
27.	F3	0,595	0,242	Valid

Sumber: Data Primer 2026

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah menguji kekonsistenan jawaban responden. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien, semakin tinggi koefisien maka reliabilitas atau konsistensi jawaban responden tinggi (Sahir, 2021). Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach* yang diperoleh mencapai $0,904 \geq 0,6$, yang menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan dalam instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang memadai.

Tabel 5. Tabel Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.904	27

Sumber: Data Primer 2026

2.8 Teknik Penyajian Data

Penyajian data adalah metode untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan disimpulkan (Sugiono, 2013). Teknik penyajian data dalam penelitian ini meliputi:

1. Tabel distribusi frekuensi digunakan untuk menampilkan sebaran data dalam bentuk distribusi tertentu. Penyusunan tabel ini bertujuan mempermudah penyajian data sehingga informasi dapat dipahami dan dianalisis dengan lebih cepat.
2. Diagram batang merupakan representasi visual dari distribusi frekuensi dalam bentuk batang atau persegi panjang. Diagram ini membantu melihat kecenderungan atau tingkat jawaban responden terhadap pertanyaan penelitian.
3. Diagram lingkaran (*Pie Chart*) adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor, di mana setiap sektor menggambarkan.